



# MATERI 1

# HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

BAGUS ANWAR H, S.H., M.H., M.SC.

# Konsep Kebijakan

- Mengapa Kebijakan publik Perlu dipelajari ?
- Konsep Kebijakan Penggunaan istilah kebijakan masih terdapat keragaman, untuk memudahkan pemahaman dikemukakan pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

- 1. Kliejn

Kebijakan sebagai tindakan secara sadar dan sistematis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran yang dijalankan langkah demi langkah

- 2. Kuypers

Kebijakan sebagai suatu susunan dari :

- a. tujuan-tujuan yang dipilih oleh para administrator publik baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kelompok
- b. sarana-sarana dan saat-saat yang mereka pilih

### 3. Friend

Kebijakan hakikatnya adalah suatu posisi yang sekali dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat dimasa yang akan datang

### 4. Carl.J.Friedrick

Kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu

### 5. James E Anderson

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

# Kesimpulan konsep kebijakan


1. konsep kebijakan sulit dirumuskan, diberi makna yang tunggal, memperlakukan sebagai gejala yang khas dan konkret, terutama bila kebijakan dilihat sebagai suatu proses yang terus berkembang dan berkelanjutan mulai proses pembuatannya sampai implementasinya.
2. Terdapat perbedaan penekanan tentang kebijakan diantara para ahli. Sebagian dari mereka melihat kebijakan sebagai suatu perbuatan, sedangkankan yang lain lebih melihat sebagai suatu sikap yang direncanakan atau bahkan suatu rencana dan juga suatu tindakan .
3. Terdapat perbedaan dalam hal tujuan dan sarana. Ada yang berpendapat kebijakan meliputi tujuan dan sarana, tujuan atau sarana, ada yang tidak menyebut tujuan dan sarana.



# MATERI 2

# HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

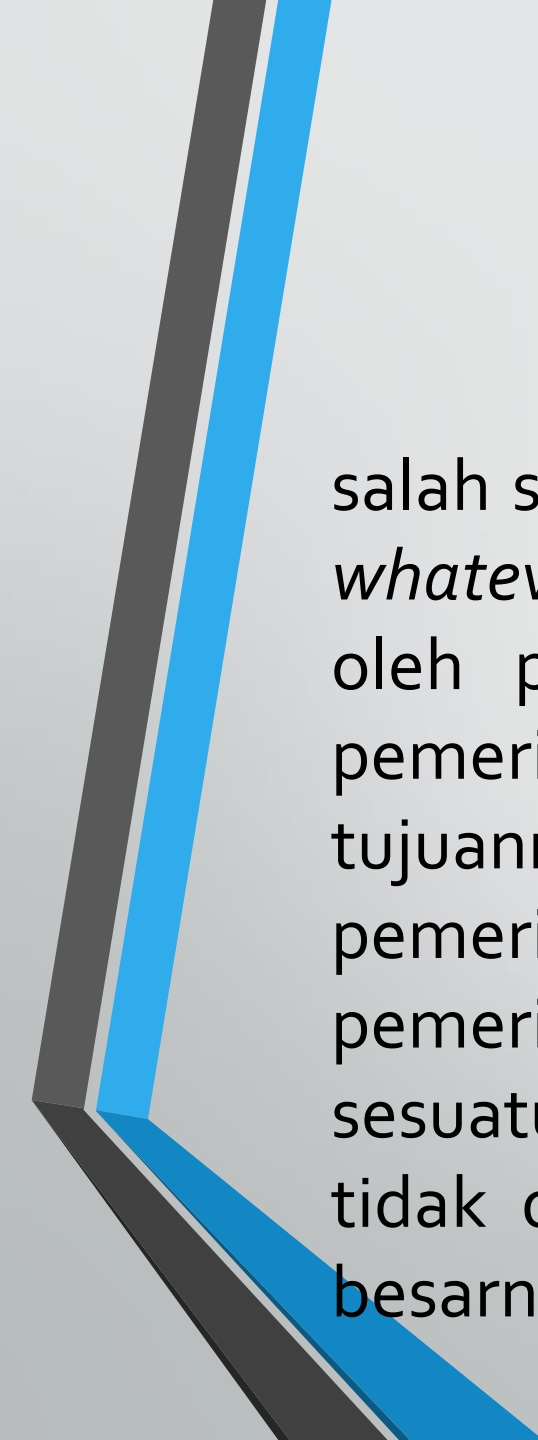
BAGUS ANWAR H, S.H., M.H., M.SC.



# Pengertian kebijakan menurut Hogwood dan Gun

1. Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (*policy as a label form a field of activity*)
2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*policy as an expression of general purpose or diserid state of affairs*)
3. Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus (*policy as spesific proposals*)
4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (*policy as decision of government*)
5. Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (*policy as formal authorization*)
6. Kebijakan sebagai program (*policy as programme*)
7. Kebijakan sebagai keluaran (*policy as output*)
8. Kebijakan sebagai hasil akhir (*policy as outcome*)
9. Kebijakan sebagai suatu teori/model (*policy as a theory or model*)
10. Kebijakan sebagai suatu proses (*policy as a process*)

- **Dari berbagai pendapat mengenai kebijakan publik seperti tersebut diatas , maka secara garis besar terdapat dua pandangan. Pertama, yang menyamakana kebijakan publik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah disebut sebagai kebijakan publik**



salah satunya pendapat Thomas R. Dye Kebijakan publik adalah *is whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya, dan kebijakan itu meliputi seluruh Tindakan pemerintah, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Termasuk didalamnya sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah, karena yang tidak dilakukan oleh pemerintah mempunyai akibat yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.



Edwards dan sharkansky mengemukakan bahwa kebijakan public itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundangundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah atau juga berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Parker dalam "*policy and administration*" kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau Tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau suatu tanggapan terhadap suatu krisis. atau dalam definisi yang lain dikemukakan, suatu wilayah tertentu dari aktivitas pemerintah sebagai subyek studi perbandingan dan studi yang kritis yang mencakup tindakan-tindakan dan prinsip-prinsip yang berbeda dan menganalisis kemungkinan sebab-sebab dan akibatakibatnya dalam konteks sesuatu disiplin pikiran tertentu seperti ekonomi, sains, atau politik.

James E. anderson

*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials* (kebijakan publik adalah kebijakankebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabatpejabat pemerintah).

Menurut Anderson implikasi dari pengertian kebijakan public adalah:


1. Kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan berisi tindakan-tindakan atau pola-pola Tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan publik bersifat positif, dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah dalam arti positif selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.



# MATERI 2

## HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

BAGUS ANWAR H, S.H., M.H., M.SC.



# TINGKAT-TINGKAT KEBIJAKAN PUBLIK

- LINGKUP NASIONAL

1. Kebijakan Nasional: Kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional. Yang berwenang: MPR, Presiden, DPR
2. Kebijakan Umum: Kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU, untuk mencapai tujuan nasional. Yang berwenang: Presiden
3. Kebijakan Pelaksanaan: merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang: Menteri/setingkat menteri dan pimpinan

- LINGKUP WILAYAH

1. Kebijakan Umum: Kebijakan Pemda sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan RT Daerah. Yang berwenang: Gubernur dan DPRD Provinsi untuk Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Daerah Kab./Kota.
2. Kebijakan Pelaksanaan, ada tiga macam:
  - a. Desentralisasi: realisasi pelaksanaan PERDA
  - b. Dekonsentrasi: pelaksanaan nasional di Daerah
  - c. Tugas pembantuan (medebewind): pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemda

# SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK

Sistem Kebijakan Publik adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan di antara 4 elemen (Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja AR, 1998)


## **Elemen-Elemen Sistem Kebijakan Publik:**

- a. Input: Masalah Kebijakan Publik, timbul karena factor lingkungan kebijakan publik yaitu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya "masalah kebijakan publik"
- b. Process (proses): Pembuatan Kebijakan Publik, bersifat politis, dalam proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda bahkan ada yang saling bertentangan.
- c. Output: Kebijakan Publik, serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu .
- d. Impacts (dampak), yaitu dampaknya terhadap kelompok sasaran (target groups)



# MATERI 4 HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

BAGUS ANWAR H, S.H., M.H., M.SC.



# TAHAP-TAHAP PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

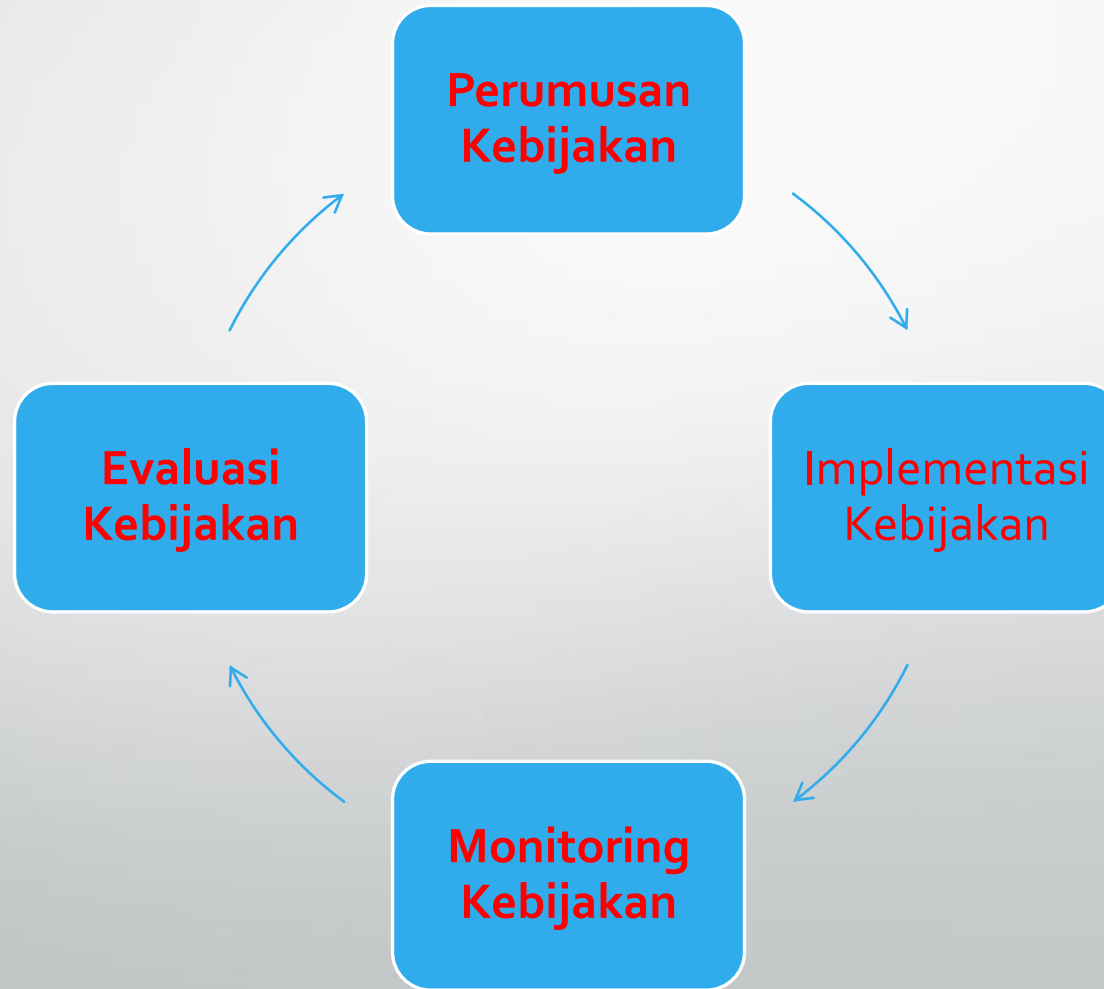
- Perumusan Kebijakan Publik/Formulasi: tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Implementasi Kebijakan Publik

Tiga bentuk kebijakan publik dilihat dari implementasinya

(Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja AR, 1988):

1. Kebijakan langsung
  2. Kebijakan tidak langsung
  3. Kebijakan campuran
- Monitoring Kebijakan Publik
  - Evaluasi Kebijakan Publik

# Siklus Kebijakan Publik





# Peran Informasi dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Syarat-syarat informasi yang baik:


(Parker: Kumorotomo dan Agus Margono, 1994)

- a. Ketersediaan (*Availability*)
- b. Mudah dipahami
- c. Relevan
- d. Bermanfaat
- e. Tepat waktu
- f. Keandalan (*Reliability*)
- g. Akurat
- h. Konsisten



# MATERI 4 HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

BAGUS ANWAR H, S.H., M.H., M.SC.




## AGENDA SETTING

- Agenda Setting adalah suatu tahap sebelum perumusan kebijakan dilakukan, yaitu bagaimana issues muncul pada agenda pemerintah yang perlu ditindaklanjuti dan diharapkan agar pemerintah segera mengambil tindakan, ternyata pemerintah tidak bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat (Howlett and Ramesh, 1995)
- Agenda Setting adalah proses dimana keinginan dari berbagai kelompok dalam masyarakat diterjemahkan ke dalam butir-butir kegiatan agar mendapat perhatian serius dari pejabat pemerintah (Cob and Ross; Howlett and Ramesh, 1995)
- Agenda Setting adalah suatu daftar subyek atau masalah dimana para pejabat pemerintah dan masyarakat di luar pemerintah yang ada kaitannya dengan pejabat tersebut, memberikan perhatian pada masalah tersebut (John Kingdon; Howlett and Ramesh, 1995)

## Tiga prasyarat agar isu kebijakan (Policy Issue) masuk agenda sistemik, menurut Cobb and Elder:

- • Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau sekurang-kurangnya menumbuhkan kesadaran masyarakat.
- • Adanya persepsi atau pandangan masyarakat bahwa perlu dilakukan beberapa Tindakan untuk memecahkan masalah itu.
- • Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari pemerintah untuk memecahkannya.



# Governmental Agenda (Agenda Pemerintah):

Serangkaian masalah yang secara eksplisit memerlukan pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat kebijakan yang sah

## Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan masyarakat masuk agenda pemerintah (Anderson; Islamy, 2001), yaitu:

- Apabila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok, menuntut tindakan pemerintah untuk mengatasi ketidak-seimbangan tersebut.
- Para pemimpin politik dapat menjadi faktor penting dalam penyusunan agenda pemerintah
- Timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa dapat menyebabkan suatu masalah masuk ke dalam agenda pemerintah.
- Adanya gerakan-gerakan protes yang merupakan salah satu penyebab yang dapat menarik perhatian pembuat kebijakan dan memasukkannya ke dalam agenda pemerintah.